

Obat Kedaluwarsa Temuan BPK Disorot DPRD

MUNGKID- Temuan Badan Pengawas Keuangan (BPK) tentang banyaknya obat-obatan kedaluwarsa di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) disorot kalangan anggota DPRD setempat. Ditengarai, hal itu akibat tata kelola yang kurang baik karena persediaan dilaporkan jauh melebihi kebutuhan normal.

Melihat kenyataan tersebut, Fraksi Partai Gerindra, menengarai adanya praktek pemborosan dalam manajemen pengadaan dan pengelolaan obat. "Patut diduga telah terjadi in-efisiensi," kata Prihadi, dari fraksi itu, kemarin.

Sorotan sama disampaikan Fraksi PDIP. Menurut dia, stok opname obat baik yang ada di Dinas Kesehatan dan Puskesmas terlalu banyak, bahkan ada yang sudah kadaluwarsa (*expired date*) atau rusak. "Kenapa stok obat terlalu banyak," tanya Isti Wahyuni, dari Fraksi PDIP.

■ Bantuan Bencana

Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes), Arwoko, mengatakan, obat-obatan kedaluwarsa yang

banyak ditemukan di Puskesmas merupakan bantuan bencana tahun sebelumnya. Baik dari pusat, provinsi maupun lembaga lainnya. Semua merupakan jenis obat yang harus tersedia sesuai program dan buffer propinsi. Antara lain, obat pasien yang terkena demam berdarah dengue (DBD), TBC, anti bisul, atau obat untuk ibu hamil.

"Semua jenis obat itu harus tersedia untuk pertolongan pertama bagi pasien, seperti untuk mencegah kematian atau kejang. Tetapi dalam praktiknya tidak terjadi kasus yang telah disiapkan jenis obat untuk keperluan itu, sehingga tidak terpakai," katanya, kemarin, didampingi Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK), Kuswanti.

Obat yang masuk kategori rusak akan dimusnahkan tahun depan (2016). Saat ini, masih dalam proses dihimpun dari seluruh puskesmas, melalui Instalasi Farmasi Kesehatan (IFK). Untuk mengantisipasi obat yang *expired date* (rusak) sudah dilakukan realokasi obat di puskesmas. ■ *TB-Tj*